

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Keanggotaan Indonesia dalam RFMO merupakan manifestasi tanggung jawab dan kewajiban Indonesia terhadap berbagai ketentuan internasional dan regional tentang pengelolaan dan konservasi tuna yang ditetapkan. Kebijakan Indonesia meratifikasi konvensi IOTC, menjadi salah satu dasar mengatur strategi pengelolaan perikanan tuna pada skala perkembangan bisnis global perikanan tangkap. Implikasi ratifikasi terhadap konvensi IOTC, membuat Indonesia memiliki akses langsung untuk memanfaatkan sumber daya ikan tuna pada wilayah perairan Samudera Hindia dan laut sekitarnya. Harmonisasi hukum nasional dan kewenangan yang diatur pada konvensi IOTC, pada prinsipnya berlandaskan kepentingan bersama antarnegara. Kebijakan Indonesia terlibat IOTC, menjadi sentral ketika dihadapkan pada kondisi bahwa kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki sangatlah potensial. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang telah diidentifikasi di Benoa-Bali.

Keikutsertaan Indonesia di IOTC juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berperan secara aktif dalam kerjasama dengan negara-negara lain melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya ikan, khususnya tuna di laut lepas Samudera Hindia. Kebijakan Indonesia menjadi anggota IOTC didasari adanya keinginan mendorong pengelolaan konservasi dan pemanfaatan optimum persediaan ikan tuna, sebagai upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Terdaftar sebagai anggota IOTC memberikan banyak peluang kepada Indonesia untuk memajukan perikanan tuna Indonesia khususnya di Samudera Hindia. IOTC merupakan suatu wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan tuna Indonesia di Samudera Hindia, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan ikan tuna dan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ikan tuna. Indonesia memiliki akses langsung terhadap Samudera Hindia dalam memanfaatkan sumberdaya ikan tuna di perairan tersebut. Kerja sama yang dilakukan oleh IOTC pada tahun 2014 – 2017 adalah

pengelolaan sumber daya ikan tuna diteritorial perairan Indonesia dalam mengatasi overfishing. Dampak Kerja Sama IOTC dengan Indonesia, yaitu dampak politik dan dampak ekonomi. Dampak politik diantaranya cakupan Wilayah Penangkapan Tuna Indonesia Semakin Luas, Indonesia Wajib Mendaftarkan Jumlah Kapal Penangkapan Tuna yang Dimiliki, Indonesia Terlepas dari Embargo dan Dikeluarkannya Peraturan tentang Tindakan Konservasi dan Manajemen Perikanan Laut Lepas. Dampak ekonomi dari kerja sama IOTC dengan Indonesia diantaranya Pasar ikan Tuna menjadi Lebih Luas dan Peningkatan Produksi dan Pendapatan Tuna Indonesia.

VI.2 Saran

Keputusan Indonesia bergabung dengan IOTC merupakan keputusan yang tepat. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya produksi Tuna Indonesia paska bergabung dengan IOTC. Namun Indonesia harus selalu cermat dalam setiap mengambil keputusan agar setiap kebijakan yang yang diambil tidak merugikan bagi kepentingan nasional Indonesia. Dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai anggota penuh IOTC maka Indonesia harus memaksimalkan peran keanggotaan tersebut. Indonesia harus melakukan strategi sebagai anggota penuh IOTC antara lain;

1. Pada pertemuan rutin antara anggota IOTC indonesia harus mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan Tuna sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Sehingga keikutsertaan Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional dan tidak hanya menjadi anggota pasif.
2. Indonesia harus selalu memperbaharui data perikanan Tuna Indonesia, khususnya di Samudera Hindia yang mencakup jumlah produksi Tuna, produktivitas ikan Tuna jumlah alat tangkap, jumlah kapal dan potensi penangkapan ikan. Sehingga produksi perikanan Tuna Indonesia bisa terkontrol karena berbasis data.
3. Indonesia haruis mampu sebagai yang utama dalam memerangi IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing dengan melaksanakan aturan dengan tegas. Hal ini agar Indonesia tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Modernisasi dan Penguatan armada penangkapan Tuna Indonesia agar bisa bersaing dengan negara anggota IOTC lainnya.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku perikanan Tuna seperti pengusaha, pemerintah dan nelayan sebagai pelaku penangkap Tuna di lautan.

Regulasi yang dibuat atas dasara penyesuaian perjanjian IOTC tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.